



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2023**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2022

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang akan dicapai.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan penduduk diperlukan suatu perencanaan yang baik, khususnya kebijakan dalam bidang administrasi kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Pengembangan strategi dan implementasinya merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, karena dalam Rancangan Rencana Kerja mengandung tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sehubungan dengan hal itu, kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang mencerminkan dan menjabarkan kegiatan secara umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 9 Mei 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I/IVb
NIP.19681210 198803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD	7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan RKPD	11
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2. Tujuan dan Sasaran RKPD	27
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	28
BAB V. PENUTUP	32
LAMPIRAN	36
SK Tim Penyusunan Rencana Kerja PD (RENJA-PD) Tahun 2023	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) pada tahun 2023.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah kabupaten, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 mengikuti tata cara dan

alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja harus selaras dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi, hal ini tercantum pada lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007, dimana disebutkan bahwa Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja PD hasil Forum Perangkat Daerah dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-PD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

Terkait dengan penyusunan Renja-PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja PD. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- u. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- v. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara;
- w. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- x. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2023 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2022.

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Akhir RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 menyesuaikan dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan, untuk lebih jelasnya dapat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 (TC.29)											
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)											
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
Kabupaten Kutai Kartanegara											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (RENJA-PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian RENSTRA PD s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target RENJA_P D Tahun 2021	Realisasi RENJA_P D Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)x100	9	10=(5+7+8)	11=(10/4)
2.06 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	90	79,70	90	81,27	90,30	82	81,27	90,30
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persen	100	90,91	100	96,75	96,75	100	96,75	96,75
2.06 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88(A)	0	90(A)	0	0.00%	80(BB)	0	0
2.06 01 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	8	8	8	100.00%	4	8	33.33%
2.06 01 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	24	8	8	8	100.00%	8	8	33.33%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Laporan	10	2	2	2	100.00%	2	2	20.00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	474	74	74	74	100.00%	100	74	56.6%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	5	1	1	1	100.00%	1	1	20.00%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	100.00%	1	1	20.00%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	1	1	1	100.00%	1	1	20.00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	20	4	4	4	100.00%	4	4	20.00%

				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500	1	1	1	100.00%	100	1	0.20%
2.06	01	01	06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	0	0	0	0.00%	8	0	0.00%
2.06	01	01	07	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	30	6	6	6	100.00%	6	6	20.00%
2.06	01	01	09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	38	13	13	13	100.00%	15	0	0.00%
2.06	01	01	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	6	6	6	100.00%	7	0	0.00%
2.06	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	17	3	3	3	100.00%	8	3	17.65%
2.06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	54000	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
2.06	01	01	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	800	87	65	87	13.85%	78	87	10.88%
2.06	01	01	17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	375000	75,000	75000	75000	100.00%	75000	75,000	20.00%
2.06	01	01	18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	556	154	154	154	100.00%	212	154	27.70%
2.06	01	01	20	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	25	2	2	2	100.00%	1	2	8.00%
2.06	01	01	21	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	45	0	0	0	0.00%	5	0	0.00%
2.06	01	01	22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	468	150	150	150	100.00%	204	150	32.05%
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	2	2	2	12.50%	2	2	26.67%
2.06	01	02	05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	60	12	12	12	100.00%	12	12	20.00%
2.06	01	02	09	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	12	12	12	100.00%	12	12	20.00%
2.06	01	02	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100.00%	12	12	20.00%
2.06	01	02	24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	16	16	16	100.00%	45	16	26.67%
2.06	01	02	24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100.00%	12	12	20.00%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	45	1	1	1	100.00%	9	1	0.00%
2.06	01	05	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	40	1	1	1	100.00%	8	0	0.00%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	0	0	0	0.00%	1	0	0.00%
2.06	01	06	05	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2. Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	99%	99%	99%	98.28	99,27%	99	98	99,27%
2.06	01	06	05		3. Persentase Kepemilikan KIA	Persen	99	44,40	20	44.40	222.00%	70	44	222.00%
2.06	01	06	05	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Dokumen	1,002,008	128,548	124,001	128,548	103.67%	150,002	128,548	12.83%
				Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2004	1	1	1	100.00%	2000	1	0.05%
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	950,000	67,102	50,000	67,102	14.20%	100,000	67,102	7.06%
2.06	01	15	20	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	50004	61445	74,000	61445	83.03%	50000	61445	122.88%
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	99%	94,80	99	94.80	95.76%	98	95	96,73%

					5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	Persen	99	9154	88	9154	104.02%	90	92	92.46%
2.06	01	5	28		6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Persen	99	100	100	100	100.00%	99	100	101.01%
				Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	Dokumen	10204	5440	4500	5440	120.89%	5650	5,440	53.31%
2.06	01	5	24	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	5200	545	500	545	109.00%	650	545	10.48%
				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Dokumen	5004	4895	4000	4895	122.38%	5000	4,895	97.82%
2.06	01	5	24	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan	Laporan	604	349	500	349	69.80%	600	349	57.78%
				Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	604	349	500	349	69.80%	600	349	57.78%
2.06	01	5	17	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100.00%	100	100	100.00%
2.06	01	5	25	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan	Dokumen	60	12	12	12	0.00%	12	12	20.00%
2.06	01	5	26	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	5	1	1	1	100.00%	1	1	20.00%
2.06	01	5	22	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	55	11	11	11	100.00%	11	11	20.00%
2.06	01	5	33	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	Laporan	204	100	100	100	100.00%	200	100	49.02%
2.06	01	5	34	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	204	100	100	100	100.00%	200	100	49.02%
2.06	01	5	35	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	5	1	1	1	100.00%	1	1	20.00%
				Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	5	1	1	1	100.00%	1	1	53.81%
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100.00%	100	100	100.00%
				Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	Dokumen	14	4	4	4	28.57%	2	4	7.62%
2.06	01	5	21	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	9	3	3	3	100.00%	1	3	33.33%
2.06	01	5	08	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	5	1	1	1	100.00%	1	1	20.00%

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Program/Kegiatan yang *belum* memenuhi target kinerja hasil/ keluaran pada tahun anggaran 2021 tidak terjadi, rata-rata capaian kinerja telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 95,6%, sedangkan untuk capaian kinerja keuangan sebesar 81,10%
- b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah:
 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan capaian kinerja kegiatan mencapai 94,10% dan capaian kinerja keuangan sebesar 79,80%.
 2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK dengan capaian kinerja kegiatan mencapai 97,60% dan capaian kinerja keuangan sebesar 93,70%.
 3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL dengan capaian kinerja kegiatan mencapai 92,50% dan capaian kinerja keuangan sebesar 61,40%.
 4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dengan capaian kinerja kegiatan mencapai 99,80% dan capaian kinerja keuangan sebesar 50,00%.
 5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN dengan capaian kinerja mencapai 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 95,90%.
- c. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran untuk tahun 2021 tidak ada.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan,

Tidak tercapainya target pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan besarnya penetapan pagu anggaran yang diberikan oleh Tim Anggaran Perangkat Daerah, sehingga capaian kinerja keuangan pada sub kegiatan tersebut hanya mencapai 73,5%, akan tetapi untuk capaian kinerja fisiknya telah mencapai 100%.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 baru berjalan satu triwulan, hal tersebut belum akan mempengaruhi capaian RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, kemungkinan

peluang untuk mencapai target kinerja masih sangat besar, karena saat ini program dan kegiatan sudah berjalan sesuai perencanaan sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dan proyeksi untuk Tahun 2022 dan 2023 kami sajikan dalam bentuk Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.2 (TC.30)												
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026												
No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			90 (Sangat Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Baik)	81,27 (Baik)		84 (Baik)	86 (Baik)	
2	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			100%	100%	100%	100%	96,75%		100%	100%	
3			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 (BB)	80 (BB)	82 (A)	84 (A)	85,63 (A)		82 (A)	84 (A)	
4			Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	99%	99%	99%	98,28%		99%	99%	
5			Persentase Kepemilikan KIA	20%	50%	70%	90%	44,40%		70%	90%	
6			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	99%	97%	98%	99%	94,80%		98%	99%	
7			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	88%	85%	90%	95%	91,54%		90%	95%	
8			Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	100%	99%	99%	99%	100%		99%	99%	
9			Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
10			Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
Rata-Rata Persentase Realisasi Capaian								89,26				

Tabel 2.3																
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 - 2021																
No	Indikator	Target s/d Akhir Tahun RENSTRA	Target Renstra-PD						Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Rasio Penduduk ber KTP elektronik persatuan penduduk	100	91%	94%	96%	98%	99%	99%	90%	96%	98%	97,97%	98,28%	99%	99%	
2	Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah	88	73%	78%	83%	88%	88%	50%	41,05%	46,19%	70,19%	79,79%	91,54%	85%	90%	
3	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100	25%	50%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	100	93%	95%	97%	98%	99%	99%	91%	91%	97%	96,14%	94,80%	97%	98%	
5	Rata-rata lama pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	2 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Hari	1 Hari	1 Hari	2 Jam	1 Jam	2 Jam	2 Jam	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	78	78	88	88	89	89	78 (100%)	88,34 (100%)	70 (79,54%)	79,7 (90%)	81,27 (Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	
7	Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai aplikasi	3.058 RT	547 RT	100 RT	1.177 RT	1234 RT	0 RT	0 RT	547 RT (17,88%)	100 RT (21,15%)	1177 RT (59,64%)	1234 RT (98,23%)	55 RT (102%)			
8	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Untuk pencapaian indikator Rasio keluarga ber Kartu Keluarga per satuan kepala keluarga, pada awal renstra telah mencapai 100 %, sehingga untuk indikator tersebut tidak dijadikan indikator kinerja pelayanan lagi, sedangkan untuk 8 (delapan) Indikator Kinerja lainnya dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 sebesar 90 (Sangat Baik) dan realisasinya 81,27 (Baik) atau capaian kinerja sebesar 90,30% (Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021). Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah :
 - a. Pencapaian hasil pengukuran IKM secara kumulatif adalah 81,27. Hal ini berarti secara umum pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Permen PAN RB No. 14 tahun 2017 tergolong "Baik" diatas untuk terus dipertahankan danditingkatkan;
 - b. Unsur yang dinilai kurang baik sebagaimana disebutkan dibawah ini : Waktu Penanganan, khusus pada Penyelesaian Pekerjaan. Pada unsur tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan maksimal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sudah banyak memfasilitasi dengan beberapa pelayanan berbasis IT, sehingga hal tersebut sangatlah bagus, agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk saran dan masukan dalam pengaduan segera untuk dapat di perbaiki dan di tindaklanjuti.
 - c. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, khusus pada menyediakan media komunikasi saran dan masukan, sebenarnya media komunikasi saran dan masukan sudah disiapkan serta sudah menggunakan media online, namun karena masyarakat kemungkinan tidak bisa membuka akses atau keterbatasan pengetahuan maupun informasi maka hal-hal seperti tersebut kurang menjadi perhatian. Untuk itu dapat diperhatikan dan di perbaiki sebagai salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah penilaian terhadap pelayanan kepada masyarakat. Begitupun indikasi sub penilaian yang dirasa kurang lainnya, Untuk memaksimalkan dalam kinerja dan pelayanan yang dinilai kurang baik diatas agar secepatnya dilakukan evaluasi perbaikan sesuai dengan kekurangan unsur yang telah disebutkan dengan melakukan rencana tindak lanjut.

2. Target Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 sebesar 100% dengan realisasinya 96,75% atau capaian kinerja sebesar 96,75% target kinerja tidak tercapai dari yang ditargetkan, hal ini dikarenakan adanya permohonan warga yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena kurangnya dokumen yang disyaratkan.
3. Target Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan nilai 80-90 (A) dan realisasinya 85,63 (A) atau capaian kinerja sebesar 107,03% (Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2021). Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dengan rekomendasi adalah :
 - a. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Belum Didukung Pedoman atau SOP;
 - b. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi yang telah kami lakukan memang benar belum memuat realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/semester);
 - c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment;
 - d. Pemantauan dan evaluasi rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan dan rekomendasi yang di tindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata sehingga tidak ada menunjukkan perbaikan setiap periode.
4. Target Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 sebesar 100% dengan realisasinya 96,75% atau capaian kinerja sebesar 96,75% target kinerja tidak tercapai dari yang ditargetkan, hal ini dikarenakan adanya permohonan warga yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena kurangnya dokumen yang disyaratkan.
5. Target Kinerja Indikator Cakupan KTP-elektronik Tahun 2021 sebesar 99% dan realisasinya 98,28% atau capaian kinerja sebesar 99,27%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu adanya pandemi covid-19 sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait perekaman KTP-el bagi warga yang berumur 17 tahun, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.
6. Target Kinerja Indikator Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah Tahun 2021 sebesar 88% dan realisasinya 91,54% atau capaian kinerja sebesar 104,02%.

Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu adanya pandemi covid-19 sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait penerbitan dokumen Akta Perkawinan bagi warga non muslim yang sudah menikah secara agama, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.

7. Target Kinerja Indikator Persentase Pelayanan Akta Kematian Tahun 2021 sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Dengan permohonan penerbitan Akta Kematian sebanyak 4.658 dokumen, yang seluruhnya terlayani dengan baik, sehingga target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu adanya pandemi covid-19 sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait penerbitan dokumen Akta Kematian bagi warga yang ada di kecamatan dan desa yang tidak terjangkau internet, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.
8. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021 sebesar 99% dan realisasinya 94,79% atau capaian kinerja sebesar 95,74%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu adanya pandemi covid-19 sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait penerbitan dokumen Akta Kelahiran, rekomendasinya adalah maksimalkan kinerja pelayanan langsung jemput bola, manfaatkan data agregat penduduk untuk mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang capaian kepemilikan akta kelahirannya masih rendah.
9. Target Kinerja Indikator Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai aplikasi teknis kependudukan tahun 2021 sebesar 100% atau sebanyak 3.058 RT dan realisasinya 101,79% atau sebanyak 3.112 RT dengan capaian kinerja sebesar 101,79%, hal ini dikarenakan adanya pemekaran RT di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga jumlah pengadaan Laptop untuk program 1 RT 1 Laptop Target kinerja tercapai. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.
10. Target Kinerja Indikator Kinerja tahun 2021 Layanan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar 100% dan realisasinya 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal ini dikarenakan terealisasinya seluruh informasi terkait administrasi kependudukan seperti informasi melalui media brosur/leaflet,

spanduk cetak digital, kalender dan media social atau website, target kinerja tercapai, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 belum dapat di evaluasi secara maksimal, mengingat kegiatan Tahun Anggaran 2022 baru berjalan satu triwulan, akan tetapi untuk capaian per 31 Desember 2021 dapat dilihat dengan rata-rata capaian diatas 90 %, hal ini dikarenakan dari 10 (sepuluh) indikator kinerja pelayanan rata-rata capaian kinerjanya mencapai 100,80%, untuk penjelasannya dapat dilihat pada uraian 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, adalah adanya pandemi COVID-19, sehingga mengurangi kecepatan dalam memberikan pelayanan langsung ke masyarakat terkait pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, yang sedianya dilakukan secara terus menerus di kecamatan, kelurahan dan desa, selain dari itu masih kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas terkait pemenuhan kebutuhan sebagai operator SIAK, serta banyaknya peralatan penunjang pelayanan penerbitan dokumen kependudukan seperti, peralatan perekaman yang sudah kadaluwarsa (out of product, out of sale, out of warranty) dan masih kurangnya Server yang mendukung pengelolaan database SIAK, pelayanan SIAK Terpusat dan digital ID

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Kutai Kartanegara akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian misi nasional yaitu "Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya" dengan fokus pada Reformasi Pelayanan Publik, adapun Motto dalam pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu : MEMBUAT MASYARAKAT BAHAGIA

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Masih kurang massifnya penyampaian informasi kepada masyarakat terkait perubahan kebijakan, prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, baik perubahan pelayanan kebijakan secara daring maupun luring.
2. Kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan cenderung meningkat menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan, sehingga memerlukan pemikiran dan inovasi dalam melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Misi Pertama Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Dengan Program Dedikasi : Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun pola pikir dan sosio kultural tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
2. Adanya dukungan logistik balngko KTP-el yang tersedia sesuai kebutuhan di daerah serta dukungan program aplikasi SIAK Terpusat dan Digital ID yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, selain itu Kutai Kartanegara merupakan salah satu lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang akan mulai dibangun di tahun 2024, hal ini akan memberikan peluang baru, seperti peningkatan ekonomi, terbukanya lapangan kerja baru dan lain sebagainya.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat dan digital ID merupakan reformasi mendasar pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara modern yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
2. Dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Program Percepatan Pemenuhan Vaksinasi COVID-19 dan Pencegahan Stunting terkait pemanfaatan data penduduk yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga data tersebut dapat digunakan secara akuntabel, efektif dan tepat guna.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari Rancangan Akhir Rencana Kerja PD yang telah disusun pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. (Lihat Tabel 2.4)

Tabel 2.4 (TC.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
No.	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	84 (Baik) 100%	20,129,551,038.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	84 (Baik) 100%	20,098,564,966.00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (BB)	17,758,657,832.00	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (BB)	17,727,671,760.00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	150,000,000.00	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	150,000,000.00	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	150,000,000.00	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	150,000,000.00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	2 Laporan	10,579,806,192.00	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	2 Laporan	10,548,820,120.00	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	10,282,266,392.00	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	10,251,280,120.00	Pengurangan Pagu Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1Laporan	297,540,000.00	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1Laporan	297,540,000.00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	25,000,000.00	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1Dokumen	25,000,000.00	
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1Laporan	25,000,000.00	4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1Laporan	25,000,000.00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	100,000,000.00	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	100,000,000.00	
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50,000,000.00	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50,000,000.00	

	6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	50,000,000.00		6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	50,000,000.00	
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	3,075,751,602.00		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	3,075,751,602.00	
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	151,578,882.00		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	151,578,882.00	
	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	33,750,000.00		8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	33,750,000.00	
	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	549,999,970.00		9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	549,999,970.00	
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10,800 Dokumen	45,000,000.00		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10,800 Dokumen	45,000,000.00	
	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	783,574,000.00		11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	783,574,000.00	
	12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75,000 Dokumen	151,848,750.00		12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75,000 Dokumen	151,848,750.00	
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120 Unit	2,570,000,000.00		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120 Unit	2,567,816,732.00	
	13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	490,000,000.00		13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	490,000,000.00	
	14	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	25,000,000.00		14	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	25,000,000.00	
	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1,985,000,000.00		15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1,882,816,732.00	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Badak dan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	70,000,000.00		16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Badak dan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	170,000,000.00	Penambahan Sewa Gedung Kantor UPT Muara Badak, Muara Jawa, sewa stand pameran Erau dan Peristiwa Merah Putih Sanga Sanga
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1,108,690,038.00		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1,110,873,306.00	
	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	44,891,000.00		17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	44,891,000.00	
	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	278,665,978.00		18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	278,665,978.00	
	19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	312,100,000.00		19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	312,100,000.00	
	20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	753,923,060.00		20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	756,106,328.00	Perubahan Pendidikan Tenaga Harian Lepas (THL) dari SLTA menjadi S1sebanyak 10rang

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	9 Unit	149,410,000.00	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	9 Unit	149,410,000.00	
	21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	49,410,000.00		21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	49,410,000.00	
	22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1Unit	100,000,000.00		22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1Unit	100,000,000.00	
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		2. Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	525,000,000.00	II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		2. Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	525,000,000.00	
			3. Persentase Kepemilikan KIA	70%	300,000,000.00				3. Persentase Kepemilikan KIA	70%	300,000,000.00	
9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan	150.002 Dokumen	825,000,000.00	9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan	150.002 Dokumen	825,000,000.00	
	23 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1Dokumen	175,000,000.00		23 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1Dokumen	175,000,000.00	
	24 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	150.000 Dokumen	350,000,000.00		24 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	150.000 Dokumen	350,000,000.00	
	25 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1Laporan	300,000,000.00		25 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1Laporan	300,000,000.00	
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	98%	350,000,000.00	III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	98%	350,000,000.00	
			5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	90%	250,000,000.00				5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	90%	250,000,000.00	
			6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%	310,893,206.00				6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%	310,893,206.00	
10	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	851 Dokumen	660,893,206.00	10	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	851 Dokumen	660,893,206.00	
	26 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	850 Dokumen	310,893,206.00		26 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	850 Dokumen	310,893,206.00	
	27 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Semua Kecamatan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1Dokumen	350,000,000.00		27 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Semua Kecamatan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1Dokumen	350,000,000.00	
11	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan	1 Laporan	250,000,000.00	11	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan	1 Laporan	250,000,000.00	
	28 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1Laporan	250,000,000.00		28 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1Laporan	250,000,000.00	

IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	475,000,000.00	IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	475,000,000.00	
12	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan	12 Dokumen	200,000,000.00	12	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan	12 Dokumen	200,000,000.00	
29	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1Dokumen	100,000,000.00	29	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1Dokumen	100,000,000.00	PROGRAM KUKAR BEBAYA
30	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11Dokumen	100,000,000.00	30	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11Dokumen	100,000,000.00	
13	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	1Laporan	200,000,000.00	13	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	1Laporan	200,000,000.00	
31	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1Laporan	200,000,000.00	31	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1Laporan	200,000,000.00	
14	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1Dokumen	75,000,000.00	14	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1Dokumen	75,000,000.00	
32	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1Dokumen	75,000,000.00	32	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1Dokumen	75,000,000.00	
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	160,000,000.00	V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	160,000,000.00	
15	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	2 Dokumen	160,000,000.00	15	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	2 Dokumen	160,000,000.00	
33	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1Dokumen	10,000,000.00	33	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1Dokumen	10,000,000.00	PROGRAM DISAPA
34	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1Dokumen	50,000,000.00	34	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1Dokumen	50,000,000.00	
Jumlah					20,129,551,038.00	Jumlah					20,098,564,966.00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal dengan RKPD,. Musrenbang merupakan upaya memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. "Amanat tersebut dengan menyelesaikan penyusunan RPJMD Kutai Kartanegara tahun 2005-2025, menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah akan berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Perangkat Daerah (PD) dan antar Pemerintah Daerah sebagai pengusung rancangan rencana kerja PD dengan masyarakat yang mengusulkan prioritas hasil musrenbang kecamatan, adapun data-data usulan program dan kegiatan masyarakat terdiri dari :

- a. Data usulan dari kecamatan yg difasilitasi dgn kegiatan Musrenbang Kecamatan.
- b. Data usulan dari SKPD yang tertuang dalam RENJA Awal SKPD.
- c. Data MUSRENBANG Tingkat Kabupaten, yaitu hasil dari Forum Gabungan SKPD dimana usulan Kecamatan dan Usulan SKPD di kompilasi menghasilkan kesepakatan baru yang difasilitasi dalam kegiatan MUSRENBANG Kabupaten.
- d. Renja akhir SKPD merupakan hasil dari Musrenbang Tingkat Kabupaten yang sudah mempunyai Kode Rekening yang akan dilanjutkan untuk proses RKPD dengan memperhatikan Pagu Indikatif, apabila ada usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Untuk Tahun 2023 maka akan kami tampilkan pada Tabel 2.5 dibawah ini, dan jika tidak ada usulan, maka hanya tabel kosong yang kami tampilkan.

Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kabupaten yang kami hadiri pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari hasil musrenbang maupun pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.5 (TC.32)

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dan Digital ID.

Pada hakekatnya adalah upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan secara terpadu melalui digitalisasi identitas, tidak hanya sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis, artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa penting yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki manfaat bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah :

- a. Menyiapkan perangkat infrastruktur untuk melakukan monitoring terhadap kondisi perangkat yang ada;
- b. Melakukan peremajaan perangkat yang sudah kadaluwarsa (out of product, out of sale, out of warranty); dan
- c. Memetakan kondisi Database Kependudukan untuk persiapan penerapan SIAK TERPUSAT.

2. Dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Program Vaksinasi COVID-19 dan Pencegahan Stunting.

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkontribusi dalam Program Vaksinasi COVID-19 melalui pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan vaksinasi dalam hal menetapkan pendataan sasaran dan distribusi Vaksin, selain daripada itu data kependudukan digunakan untuk verifikasi dan validasi data penduduk penerima Vaksin;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan BKKBN menyediakan data kependudukan untuk mensukseskan program keluarga Sejahtera dalam upaya menekan angka *stunting* di Indonesia, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memastikan setiap anak usia 0-18 tahun mendapatkan dokumen Akta Kelahiran;

- c. Data Kependudukan sangat strategis untuk mempermudah berbagai pelayanan publik, tidak hanya vaksinasi dan stunting, kedepan banyak program prioritas pemerintah yang memerlukan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Di Seluruh Indonesia.

- a. Perbaikan terhadap keluhan masyarakat dalam layanan Administrasi Kependudukan;
- b. Pelaksanaan regulasi baru bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Persiapan penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

4. Memastikan Pencapaian target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

- a. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mendorong untuk memiliki perangkat Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk memudahkan masyarakat mencetak sendiri berbagai dokumen kependudukan seperti halnya ATM di perbankan;
- b. Mewujudkan target kinerja perekaman KTP-el mencapai 99,2%
- c. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 30% ditahun 2022;
- d. Menerapkan kertas putih dalam 18 dokumen kependudukan;
- e. Menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam menerbitkan 18 dokumen kependudukan;
- f. Menyelenggarakan pelayanan online/daring;
- g. Menyelenggarakan pelayanan terintegrasi;
- h. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran mencapai 95%;
- i. Melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
- j. Mewujudkan akses data dalam pemanfaatan data kependudukan di tingkat provinsi, kabupaten/kota;
- k. Menyelenggarakan buku pokok pemakaman minimal 10 buku

5. Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih belum mencapai target nasional berkomitmen mengambil langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan target.
6. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan (kapan). Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu, **Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dengan Indikator Kinerja Tujuannya adalah ***Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil***.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, Triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menetapkan sasaran untuk tahun anggaran 2021-2026 adalah ***Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil***, dengan Indikator Kinerja Sasarannya adalah ***Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil***.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai Tujuan *Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara dengan Sasaran *Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, dengan Indikator Kinerja Sasarannya adalah *Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2023 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara;
- b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
- c. Peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2023 berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya, direncanakan berjumlah 5 (lima) Program dengan 15 (lima belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan yang dibiayai melalui anggaran APBD, yang sebagian besar merupakan Program Prioritas Bupati terpilih dan Kegiatan koordinasi dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif pada APBD Murni adalah sebesar Rp.20.098.564.966,00 untuk rencana prakiraan maju tahun 2024 kebutuhan dana/pagu indikatifnya adalah sebesar Rp. 20.129.551.038,00 dengan jumlah Program sebanyak 5 (lima) Program dengan 15 (lima belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program tidak ada perbedaan dengan RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan didalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, terdapat beberapa sub kegiatan yang akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan atau ketersediaan anggaran serta percepatan pencapaian target kinerja yang akan dicapai, adapun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2023 untuk lebih jelasnya Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 (TC.33)												
Rumusan Rancangan Akhir Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan												
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024												
Kabupaten Kutai Kartanegara												
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2 12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84 (Baik)	20,098,564,966.00			86 (Baik)	20,129,551,038.00	
					Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100 Persen				100 Persen		
2 12 01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (BB)	17,727,671,760.00			84 (A)	17,758,657,832.00	
2 12 01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	150,000,000.00			4 Dokumen	150,000,000.00	
2 12 01 2.01 06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	150,000,000.00	APBD		4 Laporan	150,000,000.00	
2 12 01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	2 Laporan	10,548,820,120.00			2 Laporan	10,579,806,192.00	
2 12 01 2.02 01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	10,251,280,120.00	APBD	Pengurangan pagu anggaran disesuaikan dengan kebutuhan	100 Orang/Bulan	10,282,266,192.00	
2 12 01 2.02 07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	297,540,000.00	APBD		1 Laporan	297,540,000.00	
2 12 01 2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	25,000,000.00			1 Dokumen	25,000,000.00	
2 12 01 2.03 05				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25,000,000.00	APBD		1 Laporan	25,000,000.00	
2 12 01 2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	100,000,000.00			4 Dokumen	100,000,000.00	
2 12 01 2.05 10				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50,000,000.00	APBD		100 Orang	50,000,000.00	
2 12 01 2.05 11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	50,000,000.00	APBD		15 Orang	50,000,000.00	
2 12 01 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	3,075,751,602.00			6 Layanan	3,075,751,602.00	
2 12 01 2.06 02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	151,578,882.00	APBD		3 Paket	151,578,882.00	
2 12 01 2.06 04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33,750,000.00	APBD		1 Paket	33,750,000.00	
2 12 01 2.06 05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	549,999,970.00	APBD		3 Paket	549,999,970.00	
2 12 01 2.06 06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10800 Dokumen	45,000,000.00	APBD		10800 Dokumen	45,000,000.00	
2 12 01 2.06 09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	783,574,000.00	APBD		160 Laporan	783,574,000.00	
2 12 01 2.06 10				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75000 Dokumen	151,848,750.00	APBD		75000 Dokumen	151,848,750.00	
2 12 01 2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120 Unit	2,567,816,732.00			95 Unit	2,570,000,000.00	
2 12 01 2.07 01				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	490,000,000.00	APBD		6 Unit	490,000,000.00	
2 12 01 2.07 05				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	25,000,000.00	APBD		10 Unit	25,000,000.00	

2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	30	Unit	1882,836,732.00	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75	Unit	1985,000,000.00
2	12	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong, Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Badak dan Muara Jawa	6	Unit	70,000,000.00	APBD	Penambahan Sewa Gedung Kantor UPT Muara Badak, Sewa Stand pameran Erau dan Peristiwa Merah Putih Sanga Sanga	6	Unit	70,000,000.00
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	Bulan	1,110,873,306.00			12	Bulan	1,108,690,038.00
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	12	Laporan	44,891,000.00	APBD		12	Laporan	44,891,000.00
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	278,665,978.00	APBD		12	Laporan	278,665,978.00
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	312,100,000.00	APBD		12	Laporan	312,100,000.00
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	756,106,328.00	APBD	Perubahan Pendidikan Tenaga Harian Lepas (THL) dari SLTA menjadi SL sebanyak 1 orang	12	Laporan	753,923,060.00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		9	Unit	149,410,000.00			9	Unit	149,410,000.00
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong	8	Unit	49,410,000.00	APBD		8	Unit	49,410,000.00
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Tenggarong	1	Unit	100,000,000.00	APBD		1	Unit	100,000,000.00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2. Persentase Kepemilikan KTP-el		99	Persen	525,000,000.00			99	Persen	525,000,000.00
						3. Persentase Kepemilikan KIA		70	Persen	300,000,000.00			90	Persen	300,000,000.00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan		150,002	Dokumen	825,000,000.00			200,002	Dokumen	825,000,000.00
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	1	Dokumen	175,000,000.00	APBD		1	Dokumen	175,000,000.00
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	150,000	Dokumen	350,000,000.00	APBD		200,000	Dokumen	350,000,000.00
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	1	Laporan	300,000,000.00	APBD		1	Laporan	300,000,000.00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun		98	Persen	350,000,000.00			99	Persen	350,000,000.00
						5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim		90	Persen	250,000,000.00			95	Persen	250,000,000.00
						6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian		99	Persen	310,893,206.00			99	Persen	310,893,206.00
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan		851	Dokumen	660,893,206.00			1101	Dokumen	660,893,206.00
2	12	03	2.02	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	850	Dokumen	310,893,206.00	APBD		1100	Dokumen	310,893,206.00
2	12	03	2.02	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Semua Kecamatan	1	Layanan	350,000,000.00	APBD		1	Dokumen	350,000,000.00
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan		1	Laporan	250,000,000.00			1	Laporan	250,000,000.00
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadalan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadalan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	1	Laporan	250,000,000.00	APBD		1	Laporan	250,000,000.00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan		100	Persen	475,000,000.00			100	Persen	475,000,000.00
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan		12	Dokumen	200,000,000.00			12	Dokumen	200,000,000.00
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Semua Kecamatan	1	Dokumen	100,000,000.00	APBD	PROGRAM RUKAR BEBAYA	1	Dokumen	100,000,000.00

2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	11	Dokumen	100,000,000.00	APBD		11	Dokumen	100,000,000.00
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	Dokumen	75,000,000.00			1	Dokumen	75,000,000.00
2	12	04	2.03	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Semua Kecamatan	1	Dokumen	75,000,000.00	APBD		1	Dokumen	75,000,000.00
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi		1	Laporan	200,000,000.00			1	Laporan	200,000,000.00
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	1	Laporan	200,000,000.00	APBD		1	Laporan	200,000,000.00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan		100	Persen	160,000,000.00			100	Persen	160,000,000.00
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan		2	Dokumen	160,000,000.00			2	Dokumen	160,000,000.00
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	1	Dokumen	10,000,000.00	APBD	PROGRAM DISAPA	1	Dokumen	10,000,000.00
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Semua Kecamatan	1	Dokumen	50,000,000.00	APBD		1	Dokumen	50,000,000.00
Jumlah										20,098,564,966.00	Jumlah				20,129,551,038.00

Tenggarong, 24 Juni 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I /IVb
NIP.19681210 198803 1 004

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1. Catatan Penting

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2023. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 Urusan Wajib Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 tidak dilakukan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tidak lagi mengakomodir Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penambahan Pagu Sub Kegiatan lebih dikarenakan untuk mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yaitu Program DISAPA atau Program Digitalisasi Pelayanan Publik yang merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi, selain dari itu Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil berupaya mendukung peningkatan pelayanan keikutsertaan BPJS masyarakat yang terdapat pada Desa yang berstatus Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, hal ini dilakukan untuk menjadi peserta BPJS masyarakat wajib memiliki kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain : Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian (apabila ada anggota keluarga yang telah meninggal dunia) dan Akta Perkawinan Non Muslim, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut serta mendukung pengentasan kemiskinan dengan cara memberikan verifikasi faktual data berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Yang dimiliki oleh Dewan Masjid Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga data penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat sesuai dengan yang ada dilapangan, selain dari itu penambahan pagu anggaran sangat dibutuhkan karena adanya penambahan **Kecamatan Baru**, yaitu **Kecamatan Kota Bangun Darat dan Samboja Barat**, hal ini akan mempengaruhi bertambahnya kebutuhan logistik terkait pencetakan KTP-el bagi penduduk dua kecamatan tersebut.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean goverment* and *good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindak lanjut Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 akan dilanjutkan ketahapan penyusunan Rancangan Akhir Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi dengan BAPPEDA dan Tim Gugus Tugas Kukar Idaman, selanjutnya inputing ke aplikasi SIPD 2023 menyesuaikan dengan perubahan atas analisis kebutuhan perangkat daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJAPD) Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, 9 Mei 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19681210 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai Dasar Jl. Wolter Mongisidi, Timbau 75511
website : disdukcapil.kukarkab.go.id email : disdukcapilkukar.2017@gmail.com
TENGGARONG

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
NOMOR : B.664/Capil/SET.2/01/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2021, LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) 2021, RENCANA KERJA (RENJA) 2023, RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN (RKA) 2023, dan DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

**PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi, yang terdiri dari :
1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021;
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) 2021;
 3. Rencana Kerja (RENJA) 2023;
 4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2023;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023;
- maka dipandang perlu adanya Penetapan Tim dimaksud;
- b. bahwa dengan adanya maksud tersebut untuk huruf (a) di atas, dipandang perlu menetapkan tim yang diatur dalam suatu keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
27. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P.038/188.4/SK-PA/Capil.1/I/2022 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2021, Rencana Kerja (RENJA) 2023, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2021, Rencana Kerja (RENJA) 2023, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Pengguna Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19681210 198803 1 004

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Nomor : B.664/Capil/SET.2/01/2022
Tanggal : 11 Januari 2022
Tentang : Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2021, Rencana Kerja
(RENJA) 2023, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023.

SUSUNAN PERSONALIA

Pengarah : Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si (Kepala Dinas)
Penanggung Jawab : Muhammad Syamsu Rizal, SE (Kepala Sub Bagian Perencanaan)
Ketua : Edwinson Dumas (Staf Sub Bagian Perencanaan)
Sekretaris : Ali Hamrul Hidayatullah (Staf Sub Bagian Perencanaan)
Anggota :
1. Sudy (Analis Keuangan Pusat dan Daerah)
2. Aryadi Wijaya (Staf Sub Bagian Keuangan)
3. Rachmad Toyib (Staf Sub Bagian Perencanaan)
4. Hj. Hermaniwati, SE (Staf Sub Bagian Keuangan)
5. Desiana Dwi Maulida, S.Sos (Staf Sub Bagian Keuangan)

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Pengguna Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19681210 198803 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Masing – masing yang bersangkutan di – Tenggarong
2. Arsip